

**ANALISIS BELANJA DESA TERHADAP PENDAPATAN ALOKASI DANA DESA
PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar)**

Lusiana Fatmaningsih¹⁾, Pardi²⁾

¹⁾Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Email¹⁾: Lusianafaynink@gmail.com

²⁾Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Email²⁾: se833827@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of the realization of village expenditure, the source of which comes from transfer funds, on village fund allocation income. This study uses a quantitative approach. This study uses secondary data. The population used is the village financial reports for January to October 2020 in the 6 sample villages in the Gondangrejo sub-district, Karanganyar regency. From this study, the results of the hypothesis test using multiple linear regression analysis provide evidence that the realized value of village expenditures has a positive and significant effect on village fund allocation income. Using the help of SPSS software version 24.

Keywords: *village fund allocation income, village expenditure realization*

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v22i1.2160>

1. PENDAHULUAN

Kecamatan Gondangrejo menjadi salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Luas wilayah ini adalah 4.891.22 Ha. Di kecamatan Gondangrejo terdiri dari 13 desa yaitu Kragan, Wonosari, Karangturi, Plesungan, Rejosari, Jeruksawit, Krendowahono, Tuban, Wonorejo, desa Dayu, Jatikuwung, Bulurejo, selokaton. Seluruh desa di Kecamatan Gondangrejo sudah berklasifikasi desa swasembada, sebutan desa yang sebagian besar masyarakatnya sudah terbiasa mengelola sumber daya alam yang dimiliki dengan maksimal dan masyarakat desa mampu mengembangkan potensinya dalam berbagai bidang termasuk infrastruktur pembangunan.

Bedasarkan peraturan pemerintah yang tertera dalam UU No.6 2014, menyatakan “desa bukan hanya sebagai objek dalam pembangunan, tetapi sebagai subjek dan pusat pembangunan

infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan warga sekitar”. Desa sendiri diberi wewenang dari pemerintah pusat untuk mengatur urusan *intern* pemerintahan dan kepentingan masyarakat masing-masing desa, termasuk mengelola menggunakan dana desa.

Fenomena bencana alam yang terjadi saat ini memiliki dampak bagi negara Indonesia, hal ini dapat di lihat jelas dari lumpuhnya perekonomian masyarakat baik dibidang pemerintah maupun swasta. Efek pandemi virus covid-19 terhadap kehidupan masyarakat bawah selain menyerang langsung kesehatan masyarakat, virus ini juga mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi, tak hanya itu masa pandemi ini juga mampu merubah pemrioritasan penggunaan keuangan desa agar mampu digunakan untuk agenda pemerintah yang dirasa lebih bermanfaat bagi warga desanya. Seperti kegiatan dalam rangka menangani pandemi covid

atau program-program lain yang berhubungan dengan pembangunan dan kegiatan padat karya tunai desa seperti yang tertera pada PDTT 7 tahun 2020.

Seperti yang kita ketahui penyusunan APBDes dilakukan pada akhir tahun 2019 dan presiden Joko Widodo pertama kali mengumumkan bahwa warga Indonesia yang bertempat tinggal di Balisudah terkena virus covid-19 sewaktu mereka liburan ke luar Negeri.(detiknews.com 26 April 2020).

Dengan adanya berita tersebut pemerintah Indonesia pada tanggal 24 maret 2020 menerbitkan Se Mendes no 8/2020 yang menyebutkan bahwa peraturan terbaru yang tertera dalam surat edaran tersebut sebagai inti dari perubahan penyusunan APBDes dalam menggeser nilai nominal pembelanjaan bidang serta sub bidang lainnya agar dialokasikan ke dalam bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, mendesak serta bidang pelaksanaan infrastruktur desa dalam rangka kegiatan padat karya *cash* desa. Perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa juga terjadi pada dana yang bersumber dari dana transfer. Sebagian besar desa yang ada dikecamatan Gondangrejo mengalami pergeseran pendapatan yang sebagian dialokasikan dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk pencegahan penyebarluasan virus covid-19. Selain berpengaruh pada besarnya pendapatan yang diterima desa peraturan pemerintah terbaru juga mempengaruhi nominal belanja desa yang sumber dananya berasal kabupaten yaitu Alokasi Dana Desa. Penelitian ini bermaksud menganalisis realisasi belanja desa terhadap pendapatan alokasi dana desa pada masa pandemi (wabah virus covid-19) di kecamatan Gondangrejo dan mengetahui pengaruh realisasi belanja desa yang sumber dananya berasal dari dana transfer (Alokasi Dana Desa) terhadap pendapatan alokasi dana desa pada masa pandemi.

Teori

Melalui peraturan yang tertera dalam undang-undang desa, menyatakan bahwa kewenangan desa telah diperkuat dalam rangka

penyelenggaraan pemerintah, pemabangunan infrastruktur, membina masyarakat desa. Selain memperkuat kewenangan pemerintah desa undang-undang desa ini juga diberi beberapa sumber pendapatan sesuai dengan UUNo.6 2014, yang menyebutkan bahwa desa memiliki sumber-sumber pendapatan, yaitu: Pendapatan Asli Desa (PAD), dana desa dari APBN, pajak serta retribusi, Dana transfer atau Alokasi Dana Desa, dana bantuan Provinsi, hibah, dll

Dana desa merupakan dana bersumberkan dari APBN dan diperuntukan untuk desa. Dana ini ditransfer melalui APBD Kabupaten / kota dan tujuannya agar diprioritaskan dalam pelaksanaan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Dana ini disalurkan dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas daerah (RKD) melalui rekening kas umum daerah (RKUD). Menurut peraturan pemerintah kabupaten karanganyar Penyaluran dana desa ini harus melewati tiga tahap dalam pencairan, yaitu: tahap awal pencairan dilakukan pada awal tahun sebesar 40%(empat puluh persen), tahap selanjutnya pada bulan maret sebesar 40% juga, tahap terakhir bulan juni sebesar 20%.

Tujuan dari diberikannya dana desa ialah untuk meningkatkan kapasitas pelayanan orang banyak yang di desa, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kemajuan perekonomian, mengatasi perbedaan infrastruktur antar desa, memperkuat potensi warga sebagai subjek infrastruktur desa, mendorong dalam upaya meningkatkan swadaya dan gotong royong. Apalagi dimasa pandemi ini dana desa harus dioptimalisasikan untuk kegiatan yang lebih berguna dalam program untuk memutus rantai penyebaran virus ini.

Penyebaran virus covid-19 ini memberikandampak negatif bagi kehidupan sosial, ekonomi serta kesejahteraan masyarakat desa. Menurut UU No 1 th 2020 tentang ketentuan penggunaan dana negara dalam rangka stabilitas keuangan dalam penanganan pandemi virus covid-19 dan dalam rangka menghadapi ancaman perekonomian negara, dana desa bisa dipergunakan dalam program yang berhubungan

dengan pandemi antara lain untuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang kurang mampu serta kegiatan lain dalam pencegahan wabah ini.

Ditahun 2020 ini dana desa diprioritaskan untuk kegiatan yang berhubungan dengan program pemerintah dalam mengatasi wabah covid-19. Selain dana desa yang diperoleh dari anggaran Negara, desa juga menerima pendapatan lain dari daerah, yaitu pendapatan penyaluran dana desa. Berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Th 2007, "alokasi dana desa bersumber dari APBD kabupaten / kota, dari Dana perimbangan fiskal pusat dan daerah (10%)".

Pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat pedesaan di seluruh Indonesia agar menjadi masyarakat yang otonom dan mandiri, salah satu strategi yang dijalankan dengan memberikan dana yang berasal dari pendapatan kabupaten yaitu alokasi dana desa. Penggunaan berasal dari dana desa yang seharusnya 30 % digunakan untuk membiayai operasional pemerintah desa dan BPD, sisanya 70% untuk pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 mengalami perubahan sebanyak 3 kali dalam setahun dari permendesa PDTT 11 tahun 2019 sampai permendesa PDTT No.14 2020, perubahan yang terakhir mengatur dalam hal perubahan jangka waktu pencairan bantuan langsung tunai desa, hal ini dikarenakan Indonesia sedang mengalami masa pandemi covid-19 yang berkepanjangan.

Dimasa pandemi harus banyak melakukan perubahan selain, merubah kebiasaan hidup bersih pandemi juga mengharuskan melakukan perubahan tatanan anggaran disuatu wilayah tertentu. Akibatnya Anggaran pendapatan dan pengeluaran desa seringkali tak seimbang antara pendapatan dan belanja. Kenyataan ini disebabkan 4 faktor yaitu pendapatan desa dari bantuan, kesejahteraan masyarakat yang rendah, dana operasional yang tidak mencukupi, dan desa

sudah banyak mengalami pembangunan. (Hudayani & FPPD, 2009)

Penelitian Terdahulu

1. Annisa riski amnan (2019) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh dari alokasi dana desa dan PAD terhadap belanja desa. Dari penelitian ini menghasilkan pernyataan bahwa alokasi dana desa memiliki pengaruh positif terhadap belanja, dan variabel independen lainnya adalah pendapatan asli Desa tidak telalu berpengaruh terhadap Belanja desa.
2. Binar dwiyanto pamungkas (2020), Penelitian ini untuk mendeskripsikan penggunaan dana desa pada tahun 2020 dalam program pemerintah untuk mengatasi Covid-19 di Kabupaten Sumbawa, penelitian ini menunjukkan penggunaan dana yang ada di desa dalam mencegah dan menangani corona sampai Rp. 3.634.100.020, -. Penggunaan dana desa Rp. 28.141.939.407, -. aplikasi dana desa ke program bantuan tunai langsung desa (BLT-Dana Desa) dapat menampung hingga 24.772 keluarga binaa atau keluarga menengah kebawah.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Dalam membuat karya ilmiah ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dimana menurut Kasiram (2008) penelitian kuantitatif adalah suatu kegiatan penelitian yang proses pengelolahan datanya berupa angka (Arikunto Suharsimi (1998:117), populasi adalah semua objek yang ada dalam sebuah penelitian, apabila ingin melakukan sebuah penelitian unsur-unsurnya harus berada dalam objek yang diteliti. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan APB Desa selama tahun 2020 di kecamatan Gondangrejo.

Metode Pengumpulan Data

1. Bentuk Pengumpulan Data

Peneliti dalam menyelesaikan karya ilmiah ini menggunakan data dalam bentuk data runtun waktu atau *time series* yang dihasilkan dari laporan pendapatan Alokasi dana desa danrealisasi belanja desa periode 01 januari – 31 oktober 2020 di sebagian desa yang wilayahnya masuk di kecamatan Gondangrejo.

2. Sumber Data Dan Jenis Data

Data studi menggunakan jenis Data sekunder,data ini didapat secara tak langsung atau melalui media perantara, seperti catatan keuangan, bukti (bisa berupa nota, kwitansi, dll yang berhubungan dengan transaksi) dan arsip desa. Disini peneliti memakai jenis data sekunder berupa dokumen laporan keuangan APBDesa terutama dibagian Alokasi Dana Desa.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menggumpulakn data, peneliti menggunakan teknik:

a. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa perangkat desa dalam rangka pelaksanaan karya ilmiah ini. Menurut peneliti, orang-orang tersebut memiliki informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini karena mereka langsung berhadapan dengan masalah yang peneliti teliti setiap hari.

b. Obsevasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung dilapangan dengan melihat berbagai kegiatan desa untuk memutus rantai penularan virus covid-19 (corona), seperti kegiatan pembagian masker untuk melindungi dan *hand sanitizer* secara gratis kepada masyarkat setempat, pembangunan insfrastuktur dusun-dusun yang

ada di desa dengan tetap menjalankan protokol yang ada.

c. Dokumentasi

Dokumen penelitian ini menggunakan bentuk data laporan keuangan pendapatan alokasi dana desa, dan laporan realisasi belanja desa mulai 1 Januari 2020 hingga 31 Oktober 2020. Belanja tersebut didanai dari pendapatan penyaluran dana desa. .

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat melakukan Penelitian di kecamatan Gondangrejo, kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Tepatnya di enam kantor kelurahan yang ada di kecamatan gondangrejo yaitu kelurahan Kragan, Wonosari, Karangturi, Jeruksawit, Plesungan, Jatikuwung. Peneliti melakukan penelitian ini dengan kurung waktu dua bulan.

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Arikunto Suharsimi (1998:117), populasi ialah semua objek yang ada dalam sebuah penelitian, apabila ingin melakukan sebuah penelitian unsur-unsurnya harus berada dalam objek yang diteliti. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan APBDesa selama tahun 2020 di kecamatan Gondangrejo.

2. Sampel

Menurut Artikunto (2006: 131), sampel merupakan salah satu elemen dari populasi pada saat dilakukan penelitian. Dalam penelitian menggunakan sampel laporan pendapatan alokasi dana desa enam desa di Kecamatan Gondangrejo dan laporan realisasi belanja desa periode Januari 2020 sampai 2020.

Alat Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif.

Analisis statistik deskriptif ialah metode statistik yang digunakan

untuk mendeskripsikan sebuah data yang telah dikumpulkan dalam suatu informasi. Statistik deskripsi memiliki aktivitas mulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian data serta analisis sederhana (hanya meliputi sekelompok data).

2. Analisis Regresi Berganda.

Regresi linier berganda ialah model regresi linier dengan variabel dependen kontinu dan variabel independen "k" (dua atau lebih) kontinu / kategorikal (Harlan, 2018). variabel dependen adalah skala data interval atau rasio (kuantitatif / *numeric*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Deskripsi data variabel penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan laporan pendapatan alokasi dana desa serta realisasi belanja desa yang sumber dana berasal dari pendapatan alokasi dana desa. Disini penulis menggunakan enam desa sebagai sampel di kecamatan Gondangrejo kabupaten Karanganyar selama satu tahun, terhitung dari bulan Januari 2020 samapai Oktober 2020. Dalam membuat karya ilmiah ini peneliti menggunakan teknik *purpose sampling* untuk pengambilan sampel, alasan penulis mengambil teknik ini adalah karena pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan kriteria-kriteria tertentu yang penulis rasa sudah lengkap terdapat di enam desa tersebut.

Variabel variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Variabel Independen

- a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa.
Menurut peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020, penghasilan tetap mengacu pada penghasilan legal

yang diperoleh kades dan prades, dan sumber dananya adalah pendapatan dari kabupaten. Tunjangan tersebut merupakan penghasilan selain penghasilan normal kades dan prades.

Menurut PP nomor 11 tahun 2019 ayat (1) menyatakan Bahwapenghasilan tetap kades dan prades dianggarkan dalam pendapatan Alokasi Dana Desa yang ada pada APBDes. Ayat ini hasil penegasan atas undang-undang desa yaitu pasal 66 ayat 1 dan 2 tentang penghasilan tetap yang menjadi hak kepala desa dan perangkatnya yang sumber dananya berasal dari pendapatan Alokasi dana desa. Biaya untuk peningkatan SDM pegawai pemerintah desa.

- b. Peningkatan kapasitas SDM kepala desa dan perangkat desa.

Dalam Permen No. 16th 2018, dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya kepada masyarakat desa berupa peningkatan mutu hidup, peningkatan kesejahteraan, dana desa tidak hanya berfokus pada rencana infrastruktur fisik, tetapi juga Meningkatkan mutu sumber daya manusia di desa.

- c. Biaya Operasional Pemerintah Desa

Menyediakan biaya operasional (biaya harian kantor) untuk pemerintah desa hingga mencapai 80% dari biaya dan PKPKD untuk belanja kebutuhan kantor, belanja kosumsi, hingga 30%.

d. Tunjangan Operasioanal BPD dan RT RW

Memberikan tunjangan BPD dengan ketentuan anggaran belanjad bidang ini, maksimal 15% dari pengeluaran maksimal 30%, digunakan untuk rapat BPD, belanja konsums,perjalanan dinas (dalam, luar desa, dan luar daerah), seragam, dan belanja modal (jika BPD memiliki kantor sendiri, dapat ditugaskan

Insentif RT/RW adalah memberikan bantuan keuangan untuk kegiatan usaha RT / RW dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat desa. Anggaran untuk memberikan imbalan RT / RW mencapai 20%-30 dari pengeluaran. Belanja anggaran digunakan untuk biaya penunjang operasional RT / RW.

2. Variabel Dependen
Belanja desa

Menurut Sugiyono dan Zulfikar (2016), variabel dependen ialah variabel yang mempengaruhi variabel independent (variabel bebas). kemudian Widiyanto (2013), juga menyatakan bahwa variabel independenialah variabel yang keberadaanya dipengaruhi oleh variabel bebas.

Belanja desa yaitu semua anggaran pengeluaran atau balanja yang menjadiahk desa dalam satu priode anggaran. Manfaat belanja desa secara langsung yang diperoleh warga adalah upah dari kegaitaan pembangunan dan pemberdayaan di desa, serta manfaat tidak langsung dari belanja desa adalah dari segi pembangunan dan kebutuhan

masyarakat umum yang lainnya terpenuhi. Ketentuan belanja desa ditetapkan sesuai dengan PP No. 47 th 2015 mengatur bahwa 70% anggaran pengeluaran digunakan untuk kegiatan dalam penyelenggaraan intern pemerintahan desa, pelaksanaan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta memberikan 30% subsidi pendapatan tetap untuk kades, prades, BPD, operasional Desa dan imbalan RT / RW.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Berdasarkan perhitungan hasil uji ini dengan menggunakan *non parametrik*, peneliti bisa menyimpulkan bahwa data atau variabel berdistribusi normal yang diwakili oleh nilai Asymp menunjukkan nilai 0,184 atau lebih tinggi dari 0,05 (ini adalah kriteria untuk memperlakukan data sebagai distribusi normal).

2. Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil uji Multikolinieritas peneliti mendapatkan hasil bahwa variabel-variabel independent saling berkolerasi, hal ini dapat dibuktikan dengan melihat nilai VIF dari masing-masing variabel < 10 (kurang dari dari sepuluh) yaitu 1,114 untuk penghasilan tetap dan tungangan kepala desa beserta perangkatnya, 1,142 untuk peningkatan kapasitas SDM kepala desa dan perangkatnya, 1,010 untuk biaya operasional pemerintah desa, 1,181 untuk tunjangan operasional BPD serta RT/RW dan nilai *Tolerance* dari masing-masaing variabel > 0,10 (lebih besar dari nol koma sepuluh), yaitu: 0,898 untuk penghasilan, 0,876 untuk SDM, 0,990 untuk operasional dan 0,874 untuk tunjangan BPD.

3. Uji Autokorelasi

Dilihat dari nilai Durbin-Watson yaitu 1,728, dengan perbandingan menggunakan tabel nilai signifikan 5% atau 0,05, sedangkan jumlah dari n (sampel) 60 dan variabel independent 4 ($k=4$), menurut tabel nilai Durbin-Watson maka peneliti memperoleh nilai d_U : 1,727 sedangkan nilai $4-D_U = 2,273$. syarat lulus uji ini adalah nilai $D_w > D_U$ ($1,728 > 1,727$) dan $D_w < 4-D_U$ ($1,728 < 2,273$), dari sini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Autokorelasi pada data penelitian ini.

4. Uji Heteroskedastisitas

Setelah peneliti melakukan uji ini, peneliti mendapatkan hasil yaitu nilai Sig untuk masing-masing variabel independent adalah 0,194 untuk penghasilan, 0,051 untuk SDM, 0,931 untuk Operasional, 0,307 untuk BPD dan RT RW dari nilai variabel-variabel tersebut semuanya di atas 0,05 (kurang dari 0,05). dari hasil ini peneliti memperoleh kesimpulan bahwa variabel yang digunakan tidak terjadi Heteroskedastisitas.

5. Uji Linearitas

pengambilan kesimpulan Linearitas dengan menggunakan kriteria jika nilai Sig atau signifikansi pada Deviation from Linearity $> 0,05$ (lebih kecil dari nol koma nol lima) maka hubungan antara variabel-variabel adalah linier sedangkan dalam pengujian ini memiliki hasil 0,890 digunakan untuk pengeluaran gaji tetap serta tunjangan kades beserta prades, 0,054 digunakan untuk meningkatkan kapasitas SDM kepala desa beserta perangkatnya, 0,615 untuk biaya operasional pemerintah desa, 0,094 untuk tunjangan operasional BPD beserta RT/RW. Dari hasil uji linear ini

peneliti Dapat melihat bahwa nilai masing masing variabel tidak ada yang hasil Deviation from Linearity lebih kecil dari nol koma nol lima ($< 0,05$). Maka penelitian ini linear.

Hasil Analisis

1. Analisis Statistik Deskriptif

a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa beserta perangkat desa.

Selama periode pengamatan Januari 2020 hingga Oktober 2020 rata-rata (*mean*) pendapatan tetap variabel dan tunjangan kades dan kader desa adalah 35.574.125,00, dan *standar deviasi* 4.069.407.818. dari hasil analisis ini nilai *mean* lebih tinggi dari standar deviasi yang berarti pendapatan tetap dan tunjangan kades dan kader desa memiliki kontribusi baik kepada instansi pemerintah.

b. Peningkatan kapasitas SDM kades dan prades.

Variabel ini mempunyai nilai *mean* (rata-rata) 2.169.764,62 dan nilai standar deviasi 806.154,627, dapat dilihat nilai *mean* lebih tinggi dari nilai standar deviasi, ini berarti peningkatan kapasitas SDM pegawai yang ada dipemerintahan desa di kecamatan gondangrejo mampu memberikan partisipasi atau kontribusi lebih baik dalam sebuah lembaga pemerintah.

c. Biaya operasional pemerintah desa.

Variabel ini mempunyai nilai *mean* 9.489.442,25 dan nilai standar deviasi 7.280.475,19 Artinya nilai *mean* lebih tinggi dari standar deviasi, maka

peneliti menyimpulkan bahwa biaya operasional pemerintah desa dapat lebih berkontribusi atau berpartisipasi pada instansi pemerintah.

- d. Tunjangan operasional BPD dan RT RW.

Variabel tunjangan operasional Badan Pemusyawaratan Desa dan Rt/Rw mempunyai nilai rata-rata (mean) 4.882.500,00 dan nilai standar deviasi 3.122.498,855. Nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi, berarti variabel ini memiliki kontribusi yang lebih kuat dalam sebuah lembaga pemerintah.

2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Koefisien persamaan regresi ditunjukkan pada koefisien non-standar di kolom "B" (β). Pada kolom ini persamaan regresi adalah $Y = 8.006.159.476 + 0.995 X_1 + 0.889 X_2 + 0.940 X_3 + 0.630 X_4$. Dari hasil pengujian analisis ini peneliti memperoleh dua informasi, yaitu:

- a. Konstantan sebesar 8,006,159,476 menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan jumlah pengeluaran belanja desa yang sumber dananya berasal dari pendapatan alokasi dana desa, maka nilai pendapatan Alokasi Dana Desa adalah 8,006,156,476 atau 8,006,159,000
- b. Koefisien regresi X_1 sebesar 0,995

3. Uji Hipotesis

- a. Uji Kelayakan Model (Uji F)
Untuk mengetahui hasil uji ini peneliti bisa melihat pada kolom Sig yang menunjukkan signifikan atau tidak ada nya

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dengan kriteria, jika hasil dari uji ini Sig bernilai dibawah 0,05 ($<0,05$) maka dapat diartikan data-data yang diuji mengalami. Dari hasil uji data penelitian ini nilai sig sebesar 0.000 dan berdasarkan hasil uji kelayakan model (uji f) dengan syarat diatas berarti variabel-variabel bebas berpengaruh secara bersama-sama.

- b. Uji Statistik T (Uji Parsial)

Hasil analisis uji-t dapat ditampilkan pada kolom t dan Sig. Untuk nilai sig $<0,05$ (kurang dari nol dan lima), artinya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat penting. dalam penelitian ini tidak ada variabel yang memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05.

4. Uji Koefisien Determinasi

Uji ini berguna untuk menunjukkan besar nilai sumbangan (kontribusi) variabel independent terhadap variabel dependent dilihat dari nilai R^2 (R Square) atau peneliti dapat melihat dari nilai R^2 yang disesuaikan (Adjusted R Square). Berdasarkan penelitian ini, maka nilai koefisien determinasi atau besarnya kontribusi variabel independent (gaji tetapserta tunjangan kades dan perangkatnya, peningkatan kapasitas SDM kepala desa dan perangkatnya, biaya operasional desa, tunjangan operasional BPD serta RTRW) terhadap variabel dependent (pendapatan Alokasi dana desa) menunjukkan nilai sebesar 0.822 (88,2 %) untuk R^2 dan 0,873 (87,3%)

untuk Adjusted R Square (R^2 yang disesuaikan).

3.2 Pembahasan

Interpretasi Hasil Penelitian

- a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Beserta Perangkat Desa.

Dampak besarnya pendapatan tetap serta tunjangankadesdanprades terhadap pendapatan alokasi dana desa disebabkan oleh peraturan pemerintah terbaru yaitu PP No 11 tahun 2019 yang 30% digunakan untuk belanja pendapatan tetap, tunjangan operasional BPD, dari anggaran belanja desa yang sumber dana berasal dari dana transfer atau pendapatan alokasi dana desa.

Dampak dari besarnya realisasi ini akan menyebabkan tingginya suatu nilai belanja desa dikecamatan Gondangrejo. Dan tanda *unstandardized* yang terdapat pada Uji Glejser bermakna positif ini berarti bahwa besarnya penghasilan serta tunjangan kades beserta prades yang ada di kecamatan Gondangrejo. Sedangkan nilai signifikansi memiliki arti yang penting dalam penelitian ini.

- b. Peningkatan Kapasitas SDM Kepala Desa serta Perangkat Desa.

Besarnya nilai dipengaruhi jumlah belanja desa untuk jaminan kesehatana dan jaminan sosial bagi kades beserta prades, yang setiap bulan nilainya tidak berbeda jauh. Dilihat dari nilai signifikan dari variabel-variabel

independent nilai variabel ini lebih rendah dari nilai variabel yang lain yaitu 0.051. Walaupun nilai realisasi belanja desa dibidang ini tidak terlalu tinggi, tetapi sangat mempengaruhi jumlah pendapatan alokasi dana desa di kecamatan Gondangrejo ini.

- c. Biaya Operasional Pemerintah Desa.

Biaya operasional pemerintah desa terbesar digunakan untuk membeli peralatan kantor pemerintah desa yang berguna untuk menunjang kegiatan operasional yang ada di desa seperti pembelian mesin printer, ATK dan lain-lain. Untuk jumlah Pengeluaran berbeda disetiap bulannya tergantung situasi saat itu. Dilihat dari nilai sig yang menunjukkan nilai tertinggi dari variabel yang lain yaitu sebesar 0,931. Belanja dibidang ini sangat mempengaruhi anggaran pendapatan alokasi dana desa.

- d. Tunjangan Operasional BPD dan RT/RW

Tunjangan dan operasional diberikan kepada anggota masyarakat yang tergabung dalam Badan Permusyawaratan Desa yang diberikan setiap bulannya. Dalam bidang ini juga mencatat pengeluaran untuk insentif RT/RW yang setiap bulannya berbeda. Dilihat dari nilai pada kolom *mean* lebih tinggi daristandar deviasi, maka disimpulkan variabel ini sangatlah memiliki kontribusi terhadap pendapatan alokasi dana desa.

4. KESIMPULAN

Melalui penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa belanja desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan alokasidana desa di kecamatan Gondangrejo kabupaten Karanganyar. Nilai belanja desa menjadi tolak ukur bagi pemerintah (khususnya tingkat desa) untuk menyusun APBDes yang salah satu sumbernyadari kabupaten yaitu dana transfer berupa alokasi dana desa. Semakin banyak yang dibelanjakan desa untuk mendanai operasional pemerintahan desa (Peraturan Pemerintah No.11 th2019), maka semakin besar pendapatan yang dianggarkan dari alokasidana desa. hasil uji hipotesis yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa pengeluaran desa untuk pendapatan tetap dan tunjangan kades dan prades, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kades dan prades, biaya operasionalintern desa, tunjangan operasional BPD serta RT / RW berdampak signifikan terhadap pendapatan alokasi dana desa.

Untuk pendapatan yang berasal dari alokasi dana desa sendiri tidak diprioritaskan untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan pencegahan penyebarluasan wabah virus covid-19. Pendapatan alokasi dana desa hanya terfokus pada penunjangan kegiatan operasional dalam pemerintah desa saja. Sedangkan untuk kegiatan yang berhubungan dengan wabah ini menggunakan dana desa bersumber pendapatannya APBN.

5. REFERENCE

- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi (2014). *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*: Salemba Empat
- Indrawati, Sri Mulyani (2017). *Buku Pintar Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Bandung: Kementrian Keuangan Republik Indonesia
- Indrawati, Sri Mulyani (2017). *Buku Saku Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*

Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah Dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan 2017

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pendapatan Alokasi Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Klasifikasi Belanja Desa Sesuai Dengan Kebijakan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa

Peraturan Desa Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Syahram,Salim. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Ata Pustaka Media

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perubahan Paradigma Peraturan Desa